

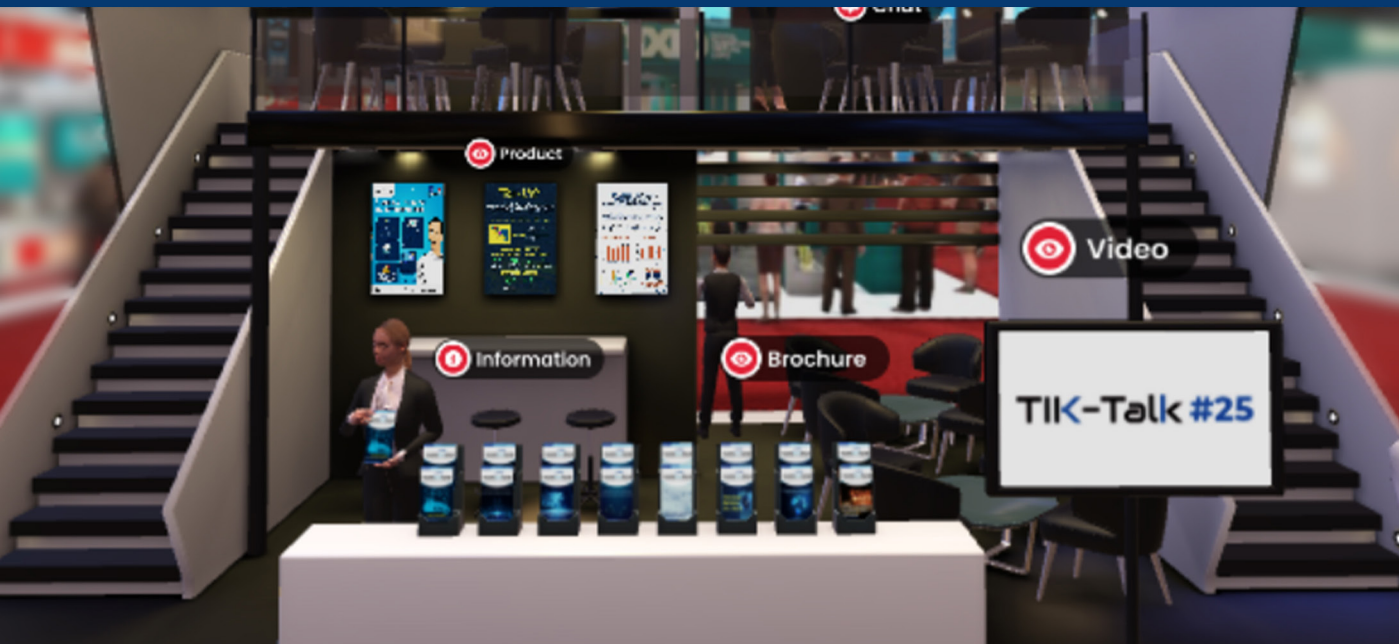


WANTIKNAS

Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional



KOLABORASI BERSAMA DI DIGITAL TRANSFORMATION *Virtual Expo 2022*



Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Sebagaimana kita ketahui transformasi digital lebih dari sekadar persoalan teknologi, melainkan seluruh lini kehidupan kita. Harus kita akui teknologi digital meningkatkan kualitas hidup, tapi ini tidak hanya terbatas pada persoalan kemudahan saja. Bicara transformasi digital berarti berbicara tentang sebuah peri kehidupan baru, sebuah kehidupan yang memanfaatkan teknologi digital sebagai bagian sehari-hari, termasuk di dalamnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka transformasi digital adalah sesuatu keniscayaan yang penting untuk dipersiapkan.

Kita sama-sama mengetahui jika sampai saat ini mobilitas kita masih terbatas akibat dari dampak pandemi Covid-19. Namun bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Justru situasi ini membuat kita menjadi lebih kreatif dan *agile* dalam beraktivitas terlebih dengan memanfaatkan teknologi digital. Oleh karenanya, acara Digital Transformation Virtual Expo 2022 atau DTXID 2022 tetap bisa kita laksanakan pada awal Februari kemarin.

DTXID 2022 adalah upaya kita untuk meningkatkan interaksi dan memperkuat koordinasi seluruh *stakeholder* serta menggali berbagai pemikiran dan pengetahuan mengenai akselerasi transformasi digital di Indonesia. Bersyukur, pada pelaksanaannya kemarin DTXID 2022 berhasil mengumpulkan seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam akselerasi transformasi digital. Mulai dari pejabat di kementerian terkait, pemerintah daerah, praktisi, akademisi, serta masyarakat umum, semua terlibat aktif untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan secara *online*.

Kita semua berharap agar situasi pandemi ini bisa segera berlalu, namun transformasi digital akan terus berlangsung seiring dengan perkembangan teknologi. Begitupula dengan DTXID, kita juga berharap agar acara ini bisa terus dilakukan di tahun-tahun yang akan datang baik *online* maupun *offline*. Sehingga koordinasi antara para *stakeholder* bisa terus terlaksana dan memberikan sumbangsih bagi keberhasilan transformasi digital Indonesia. Dari DTXID 2022 kita melihat bahwa persoalan *digital leadership* menjadi hal yang utama, maka Wantiknas merekomendasikan peran **National Chief Information Officer (NCIO)** dalam transformasi digital di Indonesia. ●

Jabat Erat

Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, M.B.A.

Ketua Tim Pelaksana WANTIKNAS



Diterbitkan oleh
Dewan TIK Nasional

Redaksi:
Tim Humas WANTIKNAS

WANTIKNAS

Dewan Teknologi Informasi dan
Komunikasi Nasional

Graha MR 21 Lt. 6
Jl. Menteng Raya No.21, Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Telp : 021-39831983

sekretariat@wantiknas.go.id

Daftar isi

02 Dari Menteng Raya

04 Fokus Utama

11 Wawancara

14 Infografis

03 Profil Wantiknas

09 TIK-Talk

13 Opini



Dewan TIK Nasional dideklarasikan pada 13 November 2006 oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhono. Dewan yang disebut oleh presiden sebagai kelompok kerja yang dibentuk untuk mendorong pembangunan teknologi informasi dan komunikasi Indonesia ini sesungguhnya bukanlah lembaga yang benar-benar baru.

Jauh sebelumnya, pada 31 Juli 1997, Pemerintah Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Presiden Suharto membentuk apa yang disebut Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) melalui Keputusan Presiden No. 30 Tahun 1997 TKTI. Selanjutnya penyempurnaan demi penyempurnaan TKTI dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan setelahnya. Namun dengan pertimbangan bahwa Tim Koordinasi Telematika Indonesia yang telah dibentuk, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan maka pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dibentuklah Wantiknas.

Jika sebelumnya TKTI diketuai oleh wakil presiden, menteri kordinator, bahkan menteri negara, namun pada Keppres No. 20 Tahun 2006 disebutkan Wantiknas langsung diketuai oleh Presiden RI dengan Ketua Pelaksana Harian, Menteri Negara Komunikasi dan Informatika.

Mengacu Keppres No. 20 Tahun 2006 yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 2006, tugas utama Wantiknas adalah merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional melalui pendayagunaan TIK. Wantiknas mengemban tugas menyiapkan cetak biru dan *roadmap* TIK Indonesia guna menentukan arah perkembangan langkah-langkah yang harus ditempuh guna mewujudkan masyarakat Indonesia berbasis pengetahuan pada 2025. Target tersebut menuntut pembangunan jaringan komunikasi bagi 43 ribu desa di tanah air yang hingga kini belum memiliki jaringan telekomunikasi tetap. Jaringan telekomunikasi juga dibutuhkan bagi 31.173 SMP dan

SMA, serta 2.428 perguruan tinggi, serta 28.504 pusat kesehatan masyarakat.

Kemudian lembaga Wantiknas kembali mengalami penyempurnaan lewat Keppres No. 1 Tahun 2014 yang menyempurnakan tugas dan susunan keanggotaan Wantiknas. Dengan Ketua Tim Pengarah yang dijabat oleh Presiden RI dan Ketua Tim Pelaksana yang dijabat oleh Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, M.B.A.

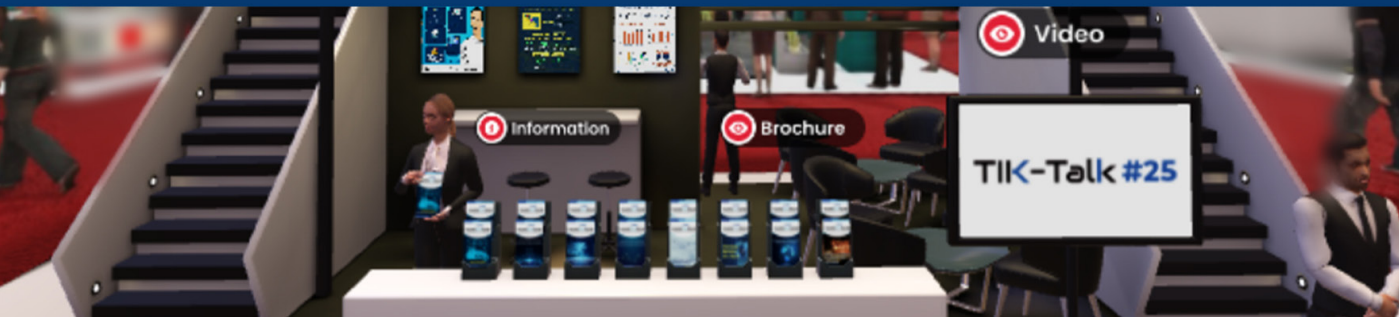
Tugas WANTIKNAS Menurut Keppres No.1 Tahun 2014

- Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional, melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi termasuk infrastruktur, aplikasi dan konten.
- Melakukan pengkajian dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- Melakukan koordinasi nasional dengan instansi Pemerintah Pusat / Daerah, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Profesional, dan komunitas teknologi informasi dan komunikasi, serta masyarakat pada umumnya dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- Memberikan persetujuan atas pelaksanaan program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat lintas kementerian agar efektif dan efisien.

Tugas Tambahan WANTIKNAS Menurut KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.86/M.PPN/HK/07/2021"

- Pengembangan Transformasi Digital

KOLABORASI BERSAMA DI DIGITAL TRANSFORMATION *Virtual Expo 2022*



Tak dipungkiri, wabah COVID-19 mempengaruhi pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024. Namun di balik itu, COVID-19 juga menjadi “chief transformation officer” paling sukses di jagad raya yang berhasil memaksa seluruh dunia melakukan percepatan langkah transformasi digital. Untuk meningkatkan interaksi dan memperkuat sinergi seluruh stakeholder dalam akselerasi transformasi digital di Indonesia, Wantiknas berinisiatif menyelenggarakan Digital Transformation Virtual Expo 2022 (DTXID 2022).

Saat memberikan arahan pada Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Perencanaan Transformasi Digital, Senin, 3 Agustus 2020 di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa transformasi digital di masa pandemi maupun *next* pandemi akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, bertransaksi yang sebelumnya *offline* dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke *online*.

“Perubahan seperti ini perlu segera diantisipasi, disiapkan, direncanakan secara matang,” tutur Presiden kala itu.

Presiden Jokowi mengamanatkan agar segera dilakukan percepatan dan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, penyiapan *roadmap*

transformasi digital di sektor-sektor strategis, percepat integrasi Pusat Data Nasional, penyiapan kebutuhan talenta digital, dan penyiapan regulasi serta skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital.

Mengingat pentingnya transformasi digital bagi masa depan bangsa, Wantiknas sebagai lembaga yang mendapat mandat untuk mengoordinasikan transformasi digital nasional, berinisiatif menyelenggarakan Digital Transformation Virtual Expo 2022 (DTXID 2022) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan interaksi dan memperkuat sinergi seluruh *stakeholder* dalam akselerasi transformasi digital di Indonesia. Acara berlangsung secara virtual atau *online* selama 3 (tiga) hari, mulai Rabu, 2 Februari hingga Jumat, 4 Februari 2022.

DTXID 2022 adalah suatu kegiatan pameran *showcase*, seminar, dan *workshop* terkait transformasi digital. Dalam pelaksanaannya, melibatkan berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, BUMN, BUMD, dunia usaha, lembaga profesional, asosiasi profesi, dan masyarakat umum. Seluruh instansi, lembaga, perusahaan, dan komunitas yang terlibat dapat memperlihatkan capaian yang telah diraih sebagai informasi dan inspirasi bagi siapa pun yang hadir pada DTXID 2022 ini.

“Sensasinya sama dengan mengunjungi ekspo secara *offline*. Kita bisa mengunjungi tur virtual ke *booth* yang tersedia kapan pun dan dari mana pun, mengambil brosur atau dokumen, melakukan komunikasi dengan operator yang bertugas, memasuki ruang seminar, mengikuti *webinar* terkait transformasi digital dari berbagai sektor, bahkan mengikuti kuis atau mendapat *doorprize* yang disediakan,” jelas anggota Tim Pelaksana Wantiknas, Hari Sungkari selaku *Organizing Committee* (OC) DTXID 2022.

Memang DTXID 2022 menerapkan konsep *metaverse*. Bagi pengunjung yang masuk ke situs DTXID 2022 maka akan menemukan visual dengan tampilan seperti layaknya suasana *expo* secara *offline*. Pengunjung bisa dengan bebas mengeksplorasi berbagai menu dan layanan yang disediakan dalam situs. Terdapat 3 fasilitas utama yang dapat diakses saat berada di lobi situs DTXID 2022 yakni *exhibition hall*, *information center*, dan *conference*.

Sebagaimana *expo* konvensional, memasuki *exhibition hall*, pengunjung akan menemukan berbagai *virtual booth* dari peserta pameran yang terdiri dari para stakeholder transformasi digital. *Virtual booth* ini bisa dikunjungi untuk mendapatkan beragam informasi mengenai institusi bersangkutan. Tercatat ada 25 institusi yang bergabung dalam pameran *showcase virtual booth* DTXID 2022.

Beberapa institusi yang terlibat dalam pameran di antaranya institusi pemerintah pusat dan daerah, perusahaan baik BUMN maupun swasta, perguruan tinggi, serta lembaga komunitas lainnya. Selain itu, terdapat *hall* khusus *digital services* Jawa Barat dengan 4 *virtual booth*.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait DTXID 2022, pengunjung bisa masuk ke fasilitas *information center* yang memuat informasi penjelasan segala hal terkait kegiatan DTXID 2022 dan pada menu *conference* para pengunjung dapat mengikuti seluruh kegiatan *webinar* dan diskusi mengenai transformasi digital yang diselenggarakan selama 3 hari berturut-turut.



Ir. Josaphat Rizal Primana, M. Sc

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
Kementerian PPN/Bappenas

DTXID 2022, Inovasi Untuk Tetap Meningkatkan Interaksi Dan Memperkuat Koordinasi

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ir. Josaphat Rizal Primana, M. Sc. mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam acara pembukaan DTXID 2022 mengungkapkan,

“Seperti yang kita ketahui, teknologi informasi berkembang kian maju, memungkinkan peredarannya semakin meluas. Dampaknya, menciptakan efisiensi terhadap waktu, biaya, ruang, dan lainnya, pada penyelenggaraan kegiatan di pemerintahan, pendidikan, dan layanan masyarakat.

Ir. Josaphat juga mengajak masyarakat terus optimis bahwa Indonesia berada pada waktu dan situasi yang tepat untuk mempercepat transformasi digital, “Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat jadi langkah penting dalam percepatan ini. Terobosan baru harus beriring dengan keseriusan bersaingan berbagi bersinergi. Kami berharap, inisiatif pelaksanaan Digital Transformation Virtual Expo 2022 ini merupakan ajang koordinasi dan ekshibi bagi seluruh *stakeholder*, baik lembaga



Ilham Akbar Habibie
Ketua Tim Pelaksana WANTIKNAS

pemerintah, badan usaha, maupun pihak lainnya, untuk mendorong transformasi digital.”

Ketua Tim Pelaksana Dewan TIK Nasional (Wantiknas) Ilham Akbar Habibie menilai DTXID 2022 merupakan sebuah inovasi untuk tetap meningkatkan interaksi dan memperkuat koordinasi seluruh *stakeholder* serta menggali berbagai pemikiran dan pengetahuan mengenai akselerasi transformasi digital di Indonesia. Sebuah langkah dalam menyusun dokumen rekomendasi akselerasi transformasi digital sebagai respon atas arahan Presiden RI.

“Di acara ini, kita akan banyak berinteraksi dan berkoordinasi dengan seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam akselerasi transformasi digital. Nantinya, akan muncul pemikiran dan pengetahuan tentang akselerasi transformasi digital dari berbagai lembaga dan tokoh yang terlibat. Dengan demikian, kita bisa menyusun sebuah dokumen rekomendasi akselerasi transformasi digital sebagai respon atas arahan Presiden RI,” ujar Ilham.

Ilham juga menuturkan bahwa acara ini menjadi suatu pembuktian bahwa Indonesia siap untuk melakukan transformasi digital.

Dari e-Government Hingga Industri

DTXID 2022 menghadirkan rangkaian *webinar* untuk menjawab arahan Presiden RI mengenai transformasi digital dengan narasumber dan moderator yang mewakili *multistakeholder*. *Webinar* ini diadakan

dalam tiga sesi selama tiga hari pelaksanaan DTXID 2022. Pada hari pertama mengangkat tema “Akselerasi Perluasan Akses Dan Peningkatan Infrastruktur Digital” dengan pembicara Ketua Umum Masyarakat Telematika selaku Anggota Tim Pelaksana Wantiknas Sarwoto Atmosutarno, S.E., M.B.E. kemudian Ketua Umum APJII Muhammad Arif Angga dan terakhir Rektor Telkom University Prof. Dr. Adiwijaya, M.Si.

Sebagai *keynote speaker* Sarwoto berbicara mengenai capaian dan strategi percepatan pembangunan infrastruktur digital. “Saat ini, sektor telematika sudah menjadi *enabler of livings*. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau Pemerintahan Digital mulai bergerak. Menurut catatan, pemerintah telah mengeluarkan dana yang cukup besar, tetapi utilitasnya hanya mencapai 30%.”

Selain itu Sarwoto juga mengingatkan bahwa Undang-Undang perlu menunjuk *National Chief Information Officer* (NCIO) dan melebur model integrasi pusdatin-pusdatin di Kementerian atau Lembaga kepada organisasi NCIO SPBE.

Selain rangkaian *webinar*, DTXID 2022 juga setiap harinya menghadirkan diskusi sektoral yang membahas perkembangan transformasi digital di beberapa sektor strategis dengan narasumber para praktisi atau pejabat yang berkecimpung di sektor terkait. Pada sesi sektoral hari pertama mengangkat tema “Akselerasi Transformasi Digital di Sektor Perdagangan dan Industri” Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika (KADIN) Firlie H. Ganinduto, kemudian Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahilil Lahadalia, S.E. diwakili Direktur Jasa dan Kawasan BKPM Dwi Suroyo dan Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, S.H, M.IP. diwakili Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno, S.E., M.M. yang paling mencuat pada sesi ini adalah soal literasi digital dan digitalisasi UMKM.

Di hari kedua *webinar* mengangkat tema “Percepatan Integrasi Pusat Data Nasional untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Berdasarkan Data-Driven” dengan pembicara Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Jakarta Smart City Yudhistira Nugraha, Koordinator Satu Data Indonesia Kementerian PPN/ Bappenas Oktoraldi Ilyas, Ph.D., yang diwakili oleh Anggota Sekretariat Satu Data Indonesia Agung Indrajit, dan Direktur Digital dan TI - PT. Bank Rakyat Indonesia Dr. Ir. Indra Utoyo, M.Sc. diwakili oleh Kepala Divisi Enterprise Data Management BRI Maulana Yusuf.

Yudhistira Nugraha sebagai *keynote speaker* mengatakan, “Berbicara *smart city*, sebenarnya bukan tentang kota dengan teknologi saja. Melainkan, tentang langkah membangun sistem teknologi melalui kolaborasi atau keterlibatan antara seluruh elemen, pemerintah sebagai *collaborator* dan masyarakat

sebagai *co-creator*. Jadi, masyarakat turut berperan aktif menyelesaikan permasalahan di kotanya.”

Hal ini ditanggapi oleh Agung Indrajit yang mengingatkan perlunya konsolidasi, “Kita perlu berkonsolidasi untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Saya berharap, Indonesia memiliki kedaulatan dan kemandirian digital, masyarakatnya pun bisa mendayagunakan digital. Oleh karenanya, perlu adanya integrasi antar pemerintah pusat, daerah, akademisi, organisasi, dan masyarakat luas,” ujarnya.

Untuk diskusi sektoral hari kedua tema yang diangkat adalah “Percepatan Implementasi Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas Sejalan dengan Strategi Peta Jalan” dengan pembicara Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi M. Hasan Chabibie, *Chief Digital Transformation Officer* Kementerian Kesehatan Setiaji diwakili oleh *Chief Operating Officer* Kementerian Kesehatan Daniel Oscar Baskoro, serta Gubernur Bali Wayan Koster.

Lanjut di hari ketiga, *webinar* mengangkat tema “Kolaborasi Multi-Stakeholder untuk Memenuhi Kebutuhan Talenta Digital” yang dihadiri pembicara Gubernur Jawa Barat Dr. H. Mochamad Ridwan Kamil, diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Kepala Badan Litbang SDM Kominfo Dr. Eng. Hary Budiarto, serta Ketua Umum APTIKOM yang juga selaku Anggota Tim Pelaksana Wantiknas Prof. Zainal A. Hasibuan.

Setiawan Wangsaatmaja membahas mekanisme kerja *team of teams* (ToT’s), untuk meningkatkan produktivitas perangkat daerah. Pelaksanaan ToT’s bukan seperti struktur sebelumnya, melainkan berbasis penugasan tim dalam organisasi ataupun lintas organisasi. “Harapannya, mekanisme ToT’s akan membentuk *mind set*, *skill set*, dan *culture set*, yang *agile* dalam organisasi pemerintah, terutama di lingkup Pemprov Jabar.”

Hary Budiarto dalam paparannya menyebutkan “Menteri Kominfo membuat *Roadmap* Indonesia Digital 2021-2024 untuk melaksanakan akselerasi transformasi digital sesuai arahan

pemerintah. Kami bertanggung jawab di 4 (empat) sektor, yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.”

Hary menilai masyarakat tidak akan bisa berkembang jika aksesnya tertutup. “Kami berupaya agar talenta digital di berbagai penjuror daerah bisa mengambil peluang. Setiap daerah harus ada peningkatan talenta digital. Jadi, Kominfo mengembangkan jaringan *backbone*, *middlemile*, dan *lastmile*.”

Sementara diskusi sektoral tema yang diangkat adalah “Roadmap Transformasi Digital di Sektor Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Bantuan Sosial” dengan pembicara Cahyono Tri Birowo, S.T., MTI., selaku Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si, Bupati Kabupaten Sumedang Drs. H. Dony Ahmad Munir, S.T., M.M., dan terakhir Wakil Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc.

Sebagai pelengkap, DTXID 2022 juga mengadakan lomba penulisan terkait harapan untuk transformasi digital Indonesia yang diikuti oleh berbagai kalangan baik dari mahasiswa, pelajar, masyarakat umum, serta Aparat Sipil Negara.

Tak pelak, acara yang diselenggarakan oleh Dewan TIK Nasional bersama dengan Good News From Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bank Rakyat Indonesia, Telkom Indonesia, Telkomsel, Goodside, GoodStat, Asosiasi Pendidikan Tinggi Indonesia (APTIKOM), Komunitas ASNation, Komunitas Abdinegaramuda, Komunitas Abdimuda, dan Komunitas Mahasiswa TIK Universitas Gadjah Mada ini berlangsung dengan sukses dan mendapat respon yang antusias dari masyarakat. Tercatat hadir 1.180 Pengunjung selama tiga hari acara, tentu saja sebuah capaian yang luar biasa. Sampai jumpa lagi di DTXID yang akan datang. ●

DTXID 2022, Upaya Mencari Masukan Transformasi Digital

Sejak Desember 2021, Wantiknas telah melakukan serangkaian rapat untuk mengumpulkan bahan dan progress dari beberapa Kementerian, Asosiasi Telepon Seluler Indonesia, Bakti Kominfo, dan Wantikda (Dewan TIK Daerah). Namun, masih merasa perlu mendapatkan masukan yang lebih luas dan mendalam dari para stakeholders lainnya. Untuk itulah Wantiknas menyelenggarakan kegiatan Digital Transformation Virtual Expo 2022 (DTXID 2022) pada tanggal 2-4 Februari yang diselenggarakan secara hybrid.

Berdasarkan rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Bappenas menjabarkan bahwa setelah gerakan Making Indonesia 4.0, pemerintah akan memanfaatkan ekonomi digital untuk meningkatkan efisiensi hulu-hilir serta memberi kontribusi nilai tambah industri pengolahan secara agresif pada perekonomian. Menurut data dari *World Digital Competitiveness Ranking* tahun 2017, Indonesia berada pada peringkat ke 59 dari 63 negara. Pemerintah sadar sekali bahwa Transformasi Digital adalah salah satu kunci keberhasilan suatu negara. Bahkan salah satu dari 3 agenda G20 yang berlangsung bulan Oktober di Indonesia adalah Transformasi Digital. Presiden Jokowi pada tanggal 3 Agustus 2020 menindaklanjuti ini dengan memberikan arahan 5 Langkah Percepatan Transformasi Digital yaitu:

1. Pertama, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital.
2. Kedua, persiapkan betul roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, sektor penyiaran.
3. Ketiga, percepat integrasi Pusat Data Nasional.
4. Keempat, siapkan kebutuhan SDM talenta digital.
5. Kelima, Presiden minta yang berkaitan dengan regulasi, berkaitan dengan skema-skema



Hari Sungkari
Anggota Tim Pelaksana Wantiknas

pendanaan dan pembiayaan transformasi digital segera disiapkan secepat-cepatnya.

Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas) memiliki tugas untuk memberikan masukan terkait transformasi digital, baik yang digali dari *multistakeholders* (Pemerintah, Akademisi, Komunitas/Asosiasi dan Bisnis) dan dari Wantiknas

sendiri. Sejak Desember 2021, Wantiknas telah melakukan serangkaian rapat untuk mengumpulkan bahan dan progress dari beberapa Kementerian seperti Bappenas, Kementerian Komunikasi, Kementerian Kesehatan, Asosiasi Telepon Seluler Indonesia, Bakti Kominfo, dan Wantikda (Dewan TIK Daerah). Namun, kami merasa bahwa perlu mendapatkan masukan yang lebih luas dan mendalam dari para stakeholders lainnya. Untuk itulah Wantiknas menyelenggarakan kegiatan Digital Transformation Virtual Expo 2022 (DTXID 2022) pada tanggal 2-4 Februari yang diselenggarakan secara *hybrid*.

DTXID 2022 adalah rangkaian kegiatan pameran transformasi digital, *webinar*, sesi sektoral, dan workshop yang sepenuhnya diselenggarakan secara virtual, sehingga dapat diikuti oleh siapa pun dan dari mana pun. Saat pandemi Covid-19, berbagai kegiatan yang dilakukan secara daring sudah menjadi keniscayaan dan merupakan *New Normal*. Walaupun tidak semua pertemuan dapat dilakukan efektif secara daring, namun saat ini manfaatnya sangat terasa sekali. Turut hadir narasumber yang berasal dari luar Jawa, kami sangat menghargai beberapa kepala daerah hadir sebagai narasumber seperti Gubernur Riau, Gubernur Bali, Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Sumedang dan beberapa Sekretaris Daerah dari provinsi lainnya.

Saat ini layanan publik belum semua tersentuh digitalisasi, tapi kita harus akui ada kemajuan sangat signifikan. Sektor kesehatan terutama saat pandemi ini, aplikasi Peduli Lindungi memudahkan untuk melakukan *tracing*, untuk mencari tempat vaksinasi dan penyimpanan sertifikat vaksin secara *online* yang merupakan syarat untuk hadir atau masuk di beberapa tempat publik. Dengan tercatatnya seseorang di tempat mana saja dia bepergian memudahkan melakukan pelacakan jika di suatu daerah terjadi lonjakan Covid-19.

Menariknya, pemakaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) di aplikasi ini menandakan adanya sinkronisasi data antara Kemenkes dan Dukcapil Kemendagri. Konsep Institutional Framework di Kemenkes ini terbukti dijalankan dengan adanya

organisasi *Digital Transformation Office* (DTO) yang dibentuk pada Maret 2021. Program besarnya adalah *Single Identity Health Record* dimana setiap penduduk Indonesia akan mempunyai akses kepada “rekam medis elektronik” masing-masing sejak lahir.

Akhir kata saya ingin kemukakan, bahwa walaupun pembangunan infrastruktur digital belum mencapai 100%, namun 85,37% desa berpenduduk telah mendapatkan akses *mobile broadband*, menyisakan daerah-daerah 3T. Sebenarnya sudah merupakan progres yang amat baik. Namun menurut saya yang lebih penting lagi adalah *outcome* dari pembangunan infrastruktur ini, seberapa besar dapat meningkatkan sektor-sektor strategis di daerah itu, seperti 5 arahan presiden.

Pembangunan SDM Digital, bukan saja SDM yang berkecimpung di pembuatan teknologi, tetapi juga SDM yang membuat konten dan menggunakannya. Saya berharap SDM Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diberdayakan dan didampingi, agar usaha mereka terangkat karena penggunaan dan pemanfaatan digital. Begitu juga kreasi-kreasi konten agar tidak melanggar norma budaya kita dan keabsahan informasi yang dapat dipercaya. Hal lain yang juga sangat penting adalah implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan jantung kegiatan pemerintahan baik di pusat dan di daerah serta terwujudnya Satu Data, sehingga semua kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan tepat sasaran dan cepat.

Saya sepakat dengan pendapat para ahli di antaranya John (1998), Parsons (1995) untuk mendukung suksesnya implementasi *E-Government* perlu ada 3 kerangka yang harus terintegrasi yaitu *Regulatory Framework*, *Institutional Framework*, dan *Accountability Framework*. Spesifiknya *Accountability Framework* untuk memonitor progresnya.

Saya yakin dengan adanya *digital leadership* yang kami dan para *stakeholder* usulkan yaitu **National Chief Information Officer (NCIO)** dapat mempercepat terwujudnya dan suksesnya Transformasi Digital di Indonesia. ●

Single Smart Identity, Transformasi Digitalisasi Data Penduduk Indonesia yang Terintegrasi

Oleh:

Melynda Dwi Puspita

Apakah kamu pernah mengurus surat di kantor kecamatan, tetapi lupa membawa fotokopi KTP? Euforia betapa susahnya ketika ketinggalan berkas hampir pernah dirasakan seluruh masyarakat Indonesia.

Di saat wacana e-KTP menggelora, nyatanya dalam pelaksanaannya masih penuh kendala terutama di lingkup daerah. Mulai dari keterbatasan peralatan hingga ketidaksiapan sumber daya manusia menghadapi transformasi digital. Sesungguhnya, masihkah ada harapan bagi tanah air untuk mewujudkan digitalisasi?

Belajar dari kartu identitas tunggal negara lain

Negara besar seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Benua Eropa tampaknya sudah lama menerapkan sistem kartu identitas tunggal. *Social Security Number* (SSN) menjadi sebuah penanda kewarganegaraan masyarakat Amerika Serikat, sekaligus mampu mempermudah kegiatan sehari-hari.

SSN diperuntukkan sebagai kartu untuk membayar pajak, lisensi mengemudi, kredit bank, pembayaran dompet digital, hingga keamanan sosial. Sementara, di Benua Asia ada Thailand yang lebih dulu memberlakukan penggunaan kartu identitas pintar. Tak mau kalah, Korea Selatan dan Cina juga mewajibkan penduduk berusia 16 tahun ke atas untuk memiliki kartu identitas yang bisa terhubung dengan aplikasi WeChat.

Negara yang terkenal dengan Bollywoodnya juga berinovasi dengan Aadhar. Sebuah nama untuk identitas digital berbasis *Unique Identification Authority of India* (UIDAI) sejak 2009 silam. Negeri tetangga, Malaysia mempunyai MyKad yang menyimpan segala informasi pribadi masyarakatnya. Salah satunya untuk rekam medis dan berguna sebagai kartu perjalanan.

Mengapa sistem digitalisasi identitas sangatlah penting?

Pada 2014, pemerintah melaksanakan peluncuran tiga kartu, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Keseluruhan program tersebut menggunakan dana APBN yang disetujui oleh DPR.

Untuk KKS saja, Kementerian Sosial (Kemensos) mengurus anggaran sebesar 6,4 triliun rupiah. Sementara itu, uang sebesar 199 miliar rupiah hanya untuk mencetak kartu dan pendistribusiannya.

Selain untuk penghematan anggaran, sebenarnya ada banyak manfaat yang diraih ketika Indonesia mengikuti jejak negara lain dalam hal digitalisasi identitas. Uni Eropa (UE) melaporkan bahwa *single identity card* bisa membuat masyarakat di 27 negara mengakses berbagai layanan melalui *smartphone*.

Kartu yang terintegrasi ini dapat mempermudah masyarakat pada kegiatan pembukaan rekening bank, mendaftar di institusi pendidikan tinggi, dan banyak keuntungan lainnya. Apalagi saat pandemi sedang berlangsung seperti saat ini, kontak fisik sangat dibatasi.

Potensi penyebaran virus melalui *droplet* yang menempel pada benda mati seperti kartu sangatlah berisiko. Sesungguhnya ketika wabah

belum terhenti, bisa menjadi momentum tepat bagi pemerintah untuk mempercepat digitalisasi data penduduk yang terintegrasi. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melaporkan bahwa terjadi peningkatan transaksi digital sebesar 37,35 persen selama 2020.

Perjalanan Indonesia dalam tahapan Single Smart Identity (SSI)

Setidaknya, setiap penduduk Indonesia memiliki lima kartu yang dibawa ke mana-mana dalam sebuah dompet. Kartu-kartu tersebut meliputi KTP, kartu ATM (anjudan tunai mandiri), kartu BPJS kesehatan, kartu identitas (pelajar, mahasiswa, atau karyawan), dan kartu *membership* lainnya.

Angan untuk memberlakukan metode kartu identitas tunggal (*single identity card*) sangat jauh dari bayangan. Dompet semakin tebal dengan kartu dan kemajuan teknologi masih terpuruk.

Tak mau terperosok lebih dalam ke jurang ketertinggalan, beberapa bulan yang lalu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencoba mencetuskan ide untuk menyatukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini berguna untuk penyederhanaan dan mempermudah masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Sayangnya, pemberitaan tersebut justru disalahartikan dengan kewajiban setiap orang yang memiliki NIK seluruhnya untuk membayar pajak. Padahal sesungguhnya, keharusan membayar pajak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Artinya, baik dari sisi Pemerintah maupun masyarakat Indonesia sendiri masih belum siap untuk

transformasi digitalisasi.

Di tingkat daerah, hanya ada Jakarta sebagai ibu kota negara yang sukses mengimplementasikan ekosistem digital melalui Jakarta Smart City. Jakarta Smart City bersifat *master data management*, artinya menganalisis kebutuhan masyarakat untuk kemudian direalisasikan dalam bentuk regulasi dan layanan.

Warga Jakarta bisa mengakses layanan Application Program Interface (API) melalui kanal www.jakarta.go.id dan aplikasi Jakarta Kini (JAKI). JAKI mensyaratkan NIK sebagai *single sign-on*. Maka, cukup menggunakan NIK, seluruh data warga DKI Jakarta dapat tersimpan melalui sistem.

Penerapan sistem data terintegrasi di Jakarta dapat dijadikan contoh bagi pemerintah daerah lain di seluruh Indonesia. Tantangan dalam digitalisasi memang ada di depan mata. Namun, apabila pemerintah mau segera bergerak untuk menerapkan *Single Smart Identity*, dibutuhkan edukasi dan pemerataan transformasi digital.

Hal tersebut tentunya diwujudkan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui program yang dilaksanakan oleh Wantiknas, yaitu DTXID. Sebuah acara yang membahas transformasi digital pada 2 hingga 4 Februari lalu.

Dalam acara tersebut, pengunjung bisa berinteraksi secara virtual dan melihat berbagai *booth*. Layaknya mengunjungi *booth* asli. Lewat acara tersebut dengan dihadiri para narasumber terkait transformasi digital, acara ini diharapkan bisa mengedukasi.

Dengan begitu, cita-cita Indonesia untuk selangkah lebih maju ke depan akan segera terwujud. Transformasi digital bisa segera terwujud dengan segala bentuk kerja sama pemerintah dan masyarakat. ●



Target Transformasi Digital Tahun 2022 Dalam RPJMN

Pemerintah telah menyusun arah transformasi digital 2024 di mana pertumbuhan ekonomi digital harus mencapai **3,17%** sampai **4,66%**. Berdasarkan rancangan teknokratik **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024**, Bappenas menjabarkan bahwa setelah gerakan Making Indonesia 4.0. Pemerintah akan memanfaatkan ekonomi digital untuk meningkatkan efisiensi hulu-hilir serta memberi kontribusi nilai tambah industri pengolahan secara agresif pada perekonomian. **Dengan rancangan transformasi digital 5 tahun ke depan, peringkat kemudahan berusaha di Indonesia/ Ease on Doing Business (EoDB) pada 2024 Indonesia ditargetkan sudah menduduki peringkat ke 40**. Berikut ini target point transformasi digital dalam RPJMN :



Infrastruktur dan Akses

- ✓ Mendapatkan Akses Jaringan *Mobile Broadband* 99,00 %
- ✓ Harga Layanan *Broadband* Perkapita Indonesia 0,35 %

Sumber: Bappenas



Pusat Data & Manajemen Data

- ✓ Memanfaatkan *cloud* pemerintah 25 %
- ✓ Terhubung dengan jaringan intranet pemerintah 80% K/L, 80% Pemda
- ✓ Jumlah aplikasi generik yang dikembangkan *multi-platform* 12



Talenta Digital

- ✓ Jumlah konten negatif yang ditangani per tahun 175.000
- ✓ Jumlah peserta literasi digital bagi masyarakat 30.000.000
- ✓ Jumlah peserta pelatihan *digital skill* menuju ekonomi digital 50.000



Ekonomi Digital

- ✓ Jumlah *startup* aktif yang terbentuk 1
- ✓ Jumlah penambahan *unicorn* baru 1
- ✓ Jumlah UMKM naik kelas jadi usaha menengah 22.000



Memang betul ini tentang pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas hidup, tapi ini tidak hanya terbatas pada persoalan itu saja. Transformasi digital ini juga menyentuh pendidikan dan kebudayaan, perundang-undangan dan lain sebagainya.

**Ketua Tim Pelaksana Dewan TIK Nasional
Ilham Akbar Habibie**



G20
INDONESIA
2022

**Mari Manfaatkan Momentum
Presidensi G20 2022 Untuk
Kemajuan Digital
Indonesia**





Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
Graha MR 21 Lt. 6, Jl. Menteng Raya No.21, Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Telp : 021-39831983

sekretariat@wantiknas.go.id